



Strategi Penumbuhkembangan UMKM di Nusa Tenggara Barat

Andi Pramaria

Widyaiswara Ahli Utama Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB

Kata Kunci

Strategi, Pertumbuhan, UMKM

Abstrak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, termasuk dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya. Persoalan utama dalam pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan, mengatasi pengangguran dan kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 mencapai 746.656 jiwa (13,83%), sedangkan penduduk yang bekerja mencapai 2,64 juta jiwa (BPS NTB, 2022). Kesejahteraan masyarakat yang diukur dari PDRB per kapita mencapai Rp.18 juta, sedangkan ketimpangan pendapatan masyarakat diukur dari Indeks Gini yang mencapai 0,384. PDRB NTB tahun 2021, menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberi kontribusi sebesar 22%, sedangkan industri pengolahan hanya mencapai 4%. Hal ini mengindikasikan bahwa produk sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih banyak yang belum diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dikonsumsi. Mengingat industri pengolahan besar tidak tersedia di NTB maka untuk meningkatkan nilai tambah perlu ditumbuh-kembangkan UMKM, sekaligus guna mengatasi pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi ketimpangan. Belanja konsumsi rumah tangga mencapai proporsi 64% dari PDRB. Jika peluang konsumsi rumah tangga tersebut dapat disediakan oleh UMKM maka perekonomian daerah akan bergerak dan semakin bertumbuh.

Keywords

Strategy, Growth, MSME

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, gives freedom to regions to carry out regional development in accordance with their potential, including economic development in their region. The main problems in regional development are improving welfare, overcoming unemployment and poverty, and income inequality. The poverty rate in West Nusa Tenggara Province in 2021 reaches 746,656 people (13.83%), while the working population reaches 2.64 million people (BPS NTB, 2022). The welfare of the community as measured by GRDP per capita reaches Rp. 18 million, while inequality in people's income is measured by the Gini Index which reaches 0.384. NTB's GRDP in 2021, shows that the agriculture, forestry and fishery sectors contribute 22%, while the processing industry only reaches 4%. This indicates that there are still many products from the agricultural, forestry and fisheries sectors that have not been processed into semi-finished goods or finished goods that are ready for consumption. Considering that large manufacturing industries are not available in NTB, it is necessary to develop MSMEs to increase added value, as well as to overcome unemployment and poverty, improve welfare and reduce inequality. Household consumption expenditures account for 64% of GRDP. If the opportunity for household consumption can be provided by MSMEs, the regional economy will move and grow.

*Corresponding Author: **Andi Pramaria**, Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia
Email: andipramaria@gmail.com

PENDAHULUAN

Dinamika kebijakan dalam pemerintahan daerah diwujudkan oleh terbentuknya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip perubahan Undang-undang Pemerintahan Daerah adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah (pusat), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berlakunya Undang-undang 23 Tahun 2014 tersebut, telah banyak membawa perubahan dan pergeseran dalam pembangunan yang tadinya bersifat sentralisitis mengarah kepada desentralisasi yakni memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, termasuk dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya. Pelaksanaan pembangunan daerah menuntut adanya aparatur daerah yang bersih, disiplin, berwibawa serta mampu menjawab segala permasalahan yang terjadi didaerahnya.

Persoalan utama dalam pembangunan ekonomi daerah adalah kesejahteraan masyarakat, pengangguran dan kemiskinan, serta ketimpangan. Ketiga persoalan tersebut, saling berkaitan karena ketika kemiskinan dan pengangguran teratasi maka kesejahteraan masyarakat rata-rata akan meningkat. Namun jika tidak dibarengi dengan upaya pemerataan pendapatan maka akan menciptakan ketimpangan yang semakin lebar. Indikator kesejahteraan masyarakat diukur dari PDRB perkapita yang juga mencerminkan tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah. Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran tidak mudah, sehingga digambarkan kemiskinan seperti lingkaran setan (*vicious circle*).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak saja dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan, karena PDRB per kapita yang semakin besar, jika tidak dibarengi dengan upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran, maka pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh penduduk kelas menengah ke atas. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan digunakan indeks Gini, yang menggambarkan penduduk yang mempunyai pendapatan di bawah rata-rata dan penduduk yang diatas rata-rata. Semakin kecil nilai Indeks Gini, maka pendapatan penduduk akan semakin merata, dan sebaliknya jika nilai indeks Gini semakin tinggi maka ketimpangan pendapatan semakin lebar.

Kesejahteraan penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2021, yang diukur dengan PDRB per kapita

mencapai Rp. 18 juta. Sedangkan Indeks Gini mencapai nilai 0,384 masih tergolong mempunyai ketimpangan yang sedang.

Penduduk miskin masih cukup tinggi yaitu 746.656 jiwa (13,83%), sedangkan penduduk yang bekerja mencapai 2,64 juta jiwa (BPS NTB, 2022). Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran maka diperlukan lapangan kerja dan lapangan usaha yang lebih luas. Fenomena pencari kerja yang semakin tinggi, terlihat dari banyaknya orang yang melamar untuk menjadi ASN, sementara peluang yang tersedia sangat terbatas. SDM pencari kerja yang produktif, jika tidak diberdayakan maka akan menjadi permasalahan sosial yang berdampak buruk. Salah satu upaya dalam penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha adalah mengembangkan kewirausahaan melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pembangunan daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya daerah yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dengan membentuk pola kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna membuka kesempatan kerja baru dan pengembangan perekonomian dalam daerah tersebut (Arsyad, 2020). Selanjutnya dijelaskan bahwa persoalan paling utama pembangunan daerah terletak pada pemberian prioritas strategi dan kebijakan pembangunan yang dilandaskan pada kekhasan dari daerah tersebut (*endogenous development*) dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal meliputi SDM, kelembagaan dan sumber daya fisik lainnya. Kebijakan pembangunan ini akan lebih mendorong inisiatif-inisiatif daerah dalam proses pembangunan guna penciptaan lapangan kerja baru serta pengembangan kegiatan ekonomi yang semakin luas melalui penciptaan lapangan usaha.

Cakupan pembangunan ekonomi daerah, pada dasarnya meliputi proses pembentukan lembaga-lembaga baru, pembangunan dan perluasan industri-industri, peningkatan kemampuan tenaga kerja guna untuk peningkatan kualitas produk dan jasa, analisis pasar-pasar baru, transfer ilmu pengetahuan, dan penumbuhan usaha-usaha ekonomi baru. Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah selalu berujung pada peningkatan jenis dan jumlah kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat harus bermitra dengan baik dalam mengambil

inisiatif pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang mendayagunakan setiap sumber daya daerah, harus dilandasi kemampuan mengukur setiap sumber daya yang potensial guna keperluan merencanakan dan implementasi pembangunan perekonomian daerah (Arsyad,2020).

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak saja bersumber dari peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan nilai tambah dari produk primer, menjadi produk sekunder (barang jadi atau setengah jadi). Nilai tambah biasa disebut juga dengan nilai antara yaitu produk akhir dikurangi dengan produk primer. Meningkatnya nilai tambah, secara akumulatif akan meningkatkan kontribusi PDRB sektor industri dan pengolahan atau yang disebut dengan daya saing industri. PDRB yang semakin besar akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diukur dari PDRB per kapita. Sudah barang tentu, dengan catatan jumlah penduduk tidak meningkat lebih banyak. Oleh karena itu, Boediono dalam Arsyad (2020) menyatakan pertumbuhan penduduk sebaiknya lebih kecil dari pertumbuhan ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi terlihat nyata.

2. UMKM

Pengembangan UMKM merupakan salah satu potensi usaha ekonomi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja dan lapangan usaha. Pengembangan UMKM mempunyai nilai yang strategis terutama pada daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah namun tidak terdapat industri pengolahan skala besar. Untuk melihat potensi sumber daya daerah, dapat dilihat dari struktur PDRB suatu daerah. Sektor primer (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian) yang tinggi, sementara sektor industri olahan masih cukup rendah, menunjukkan bahwa produksi pada sektor primer masih belum diolah sebagai produk hasil industri.

UMKM di Indonesia telah membuktikan bahwa UMKM mampu bertahan terhadap terpaan krisis moneter pada tahun 1998, bahkan menjadi penyelamat perekonomian Nasional. Dalam menghadapi tekanan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid 19, UMKM tetap menjadi penyelamat dengan sumbangan PDB yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) Maret 2021, jumlah UMKM di Tanah Air telah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Kondisi tersebut memberi makna bahwa sebagian besar (61%) perekonomian Indonesia ditopang oleh

aktivitas ekonomi UMKM dan serapan tenaga kerja yang besar pula. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa eksistensi UMKM di masa sulit masih mampu bertahan, karena didukung oleh beberapa faktor, seperti : (1). sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (*consumer goods*), khususnya yang tidak tahan lama, (2). mayoritas usaha kecil lebih mengandalkan pada *non-banking financing* dalam aspek pendanaan usaha, (3). pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu, (4). terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal akibat krisis yang berkepanjangan.

Mengutip IDXChannel.com, menurut Tulus Tambunan, terdapat beberapa alasan pentingnya UMKM dalam perekonomian, meliputi :

- a) Jumlah UMKM yang sangat banyak dan tersebar di perkotaan maupun perdesaan, bahkan hingga pelosok terpencil,
- b) UMKM tergolong usaha yang sangat padat karya, mempunyai potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang besar dan peningkatan pendapatan,
- c) UMKM banyak berada dalam sektor pertanian, yang secara tidak langsung mendukung pembangunan,
- d) UMKM membantu menampung pekerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah,
- e) Dalam kondisi krisis ekonomi, UMKM tetap mampu bertahan sebagaimana terjadi pada tahun 1997, 1998 dan pada masa pandemi Covid-19,
- f) Melalui beragam jenis investasi dan penanaman modal, UMKM mampu dan cepat beradaptasi dalam kemajuan zaman.
- g) Memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara *desk research* dengan mempelajari pustaka dan data yang bersumber dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi laporan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan dan Peluang UMKM NTB

Meskipun UMKM mampu bertahan dalam menghadapi krisis moneter tahun 1998, krisis ekonomi yang disebabkan bencana alam berupa gempa bumi (2018) dan pandemi Covid 19 sejak

tahun 2019 tetapi tantangan yang dihadapi oleh UMKM tidaklah mudah. UMKM di NTB saat ini banyak menghadapi persaingan produk sejenis dari daerah lain serta banyaknya retail modern yang dikhawatirkan dapat mematikan UMKM. Adanya persaingan produk sejenis dari daerah lain, di satu sisi akan meningkatkan persaingan namun di sisi lain dengan inovasi yang baik, akan memunculkan produk baru yang berbeda dan mempunyai keunikan tersendiri. Ujung dari persaingan tersebut adalah harga, sebagai cerminan dari kualitas produk.

Peluang dalam memajukan UMKM di NTB juga sangat luas, terutama didukung oleh sumber daya alam yang variatif, sehingga memunculkan potensi pengembangan produk-produk turunan. BPS NTB (2022) menunjukkan sumbangan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2021 terhadap PDRB yang mencapai lebih dari 22% dan sektor pertambangan dan galian sebesar 17%. Hal ini mengindikasikan bahwa 39% perekonomian di NTB disumbang oleh sektor primer yaitu sektor yang mengandalkan sumber daya alam, sementara sektor industri pengolahan hanya menyumbang 4% terhadap PDRB. Produk dari sektor primer tersebut umumnya diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah (*raw materials*) atau produk yang belum diolah. Struktur perekonomian NTB yang masih didominasi oleh sektor primer dan sektor tersier, merupakan peluang bagi UMKM untuk mengolah menjadi barang dan jasa. UMKM sebagai usaha yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan barang setengah jadi, akan diperoleh nilai tambah dan mempunyai posisi penting dalam upaya peningkatan kontribusi sektor industri. BPS NTB, mencatat tahun 2019, jumlah UMKM di NTB sebanyak 645.000 unit dan menyerap 1.695.000 pekerja NTB (71,01% dari 2.387.000 orang yang bekerja), sementara tahun 2018, jumlah IKM mencapai 96.205 unit dan menyerap 259.140 orang pekerja NTB (11,58% dari 2.237.000 orang yang bekerja) dengan pertumbuhan IKM mencapai 8,14%. Jumlah tenaga kerja yang besar dan terserap dalam UMKM tersebut, menunjukkan bahwa UMKM NTB mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian daerah.

Selanjutnya BPS (2020) menunjukkan bahwa tidak kurang dari 64% PDRB NTB merupakan belanja konsumsi rumah tangga, sehingga UMKM/IKM mempunyai peluang yang besar untuk menjadi produsen kebutuhan masyarakat. UMKM perlu ditumbuhkan dan diperkuat agar mampu merebut pasar kebutuhan masyarakat yang sebelumnya banyak dipasok oleh daerah luar NTB. Jika 64% dari total PDRB NTB dibelanjakan pada produk-produk lokal NTB dan UMKM mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, maka

dapat dipastikan bahwa perekonomian daerah akan berputar serta meningkatkan kesejahteraan. Untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap produk-produk dalam daerah, maka pemerintah menetapkan berbagai kebijakan sebagai bentuk keberpihakan kepada UMKM NTB.

2. Penguatan UMKM NTB

Untuk mendorong tumbuh kembang UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dengan keberpihakan kepada UMKM. Kebijakan tersebut semakin nyata pada saat pandemi Covid-19, dengan semangat mendorong dan membela UMKM.

a) Penetapan Seragam

Penggunaan pakaian seragam pada ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diatur melalui Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/534/ORG tentang Pakaian Dinas ASN dan Non ASN. ASN diwajibkan menggunakan PDH Sasambo/tenun ikat khas NTB pada hari Selasa dan hari Kamis, sedangkan untuk non ASN diwajibkan pada hari Kamis. Penetapan pakaian dinas harian (PDH) tersebut dimaksudkan untuk melestarikan budaya khas NTB dan menggerakkan UMKM yang berbasis tenun ikat serta batik khas Sasambo. Corak dan motif tenun pada masing-masing daerah di NTB sangat bervariasi, sehingga menarik untuk digunakan sebagai pakaian dinas.

b) Penggunaan beras lokal

Konsep ekonomi yang mendasar adalah keseimbangan antara *supply and demand*. Sebagai daerah yang menghasilkan produk-produk pertanian (antara lain beras), maka diperlukan permintaan (*demand*) yang tinggi. Untuk mendorong permintaan kebutuhan beras dalam daerah, pemerintah provinsi telah membagikan 10 Kg beras produksi NTB kepada seluruh PNS, sedangkan pembayaran dilakukan melalui tambahan perbaikan penghasilan (TPP). Adanya kebijakan penggunaan beras lokal, sudah barang tentu akan menciptakan pasar.

c) JPS Gemilang

Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang merupakan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid 19 dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. JPS Gemilang tidak saja diarahkan bagi bantuan sosial semata tetapi juga sebagai cara menyelamatkan usaha-usaha lokal. Dengan

keyakinan bahwa usaha-usaha lokal di NTB, sejatinya menyimpan potensi besar. Pelaksanaan JPS Gemilang, didukung oleh 4.673 UMKM/IKM yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dan Kota. Anggaran yang digunakan mencapai Rp. 86 M, yang dibelanjakan sekaligus memperkuat UMKM/IKM. JPS Gemilang dilaksanakan dalam 3 tahap meliputi tahap I mencakup 105.000 KK, Tahap II mencakup 125.000 KK dan Tahap III mencakup 120.000 KK. Penggunaan produk lokal dalam JPS Gemilang, dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk-produk lokal. JPS Gemilang tidak saja, merupakan program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid 19 yang tidak tercakup dalam JPS pemerintah pusat namun juga diharapkan bisa menjadi trigger bagi kebangkitan dan pertumbuhan UMKM NTB.

d) Pergub Bela dan Beli Produk Lokal

Sebagai perwujudan dari upaya menggerakkan UMKM/IKM telah diterbitkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Bela dan Beli Produk Lokal. Aksi Bela dan Beli Produk Lokal merupakan ikhtiar/upaya/gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk NTB, diwujudkan melalui tindakan membela aktivitas berproduksi produk NTB (*supply side*) dan membeli atau menggunakan produk yang dihasilkan di NTB (*demand side*). Tujuan utama diterbitkannya Peraturan Gubernur adalah (a) menumbuhkembangkan kelembagaan dan pelaku UMKM agar berkapasitas dan berdaya saing, serta tangguh dan mandiri; (b) mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya lokal; (c) mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru; (d) memotivasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan (e) memperbaiki pengembangan sosial ekonomi Nusa Tenggara Barat dan mendukung ekonomi nasional. Kecintaan terhadap produk UMKM, akan mendorong berkembangnya permintaan dan akan mendorong tumbuh kembang UMKM.

e) NTBMALL

NTBMALL merupakan situs jual beli online (*e-*

commerce) produk-produk asli Unggulan NTB namun juga dapat dilakukan secara offline. Pemasaran secara offline dilakukan pada area kantor Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh produk UMKM NTB dapat berpartisipasi dalam memasarkan produknya disini, dengan syarat bahwa produk-produk yang dipasarkan merupakan produk asli NTB. Produk-produk UMKM ini terdiri dari produk olahan dan produk Handicraft, meliputi olahan makanan, fashion (tenun dan produk turunannya), kerajinan mutiara, ketak, gerabah, kerajinan kayu, dan lain-lain.

Pembuatan NTBMALL dihatikan untuk memfasilitasi pemasaran dan pengenalan produk-produk UMKM, sehingga akan makin dikenal dan mampu menembus pasar yang lebih luas. Pemasaran yang semakin luas, akan mendorong tumbuhnya permintaan dan dengan meningkatnya permintaan akan menumbuhkan supplier terhadap produk UMKM.

f) Pelibatan event

Event-event skala internasional, nasional maupun lokal dirancang dengan melibatkan UMKM. *Event World Superbike Championship* (WSBK) yang digelar bulan November 2021, MotoGP dan MXGP, dihatikan sebagai titik tolak kebangkitan UMKM. Ribuan UMKM dilibatkan dalam penyediaan produk-produk UMKM sebagai cinderamata dan kuliner. Pemanfaatan event-event tersebut akan menjadi ajang bagi pengenalan dan pemasaran produk UMKM kepada pendatang atau penonton. Minat penonton untuk membeli produk-produk UMKM sebagai cinderamata menjadi semakin tinggi sehingga akan menggerakkan UMKM.

g) Fasilitasi

Persoalan perizinan bagi UMKM dapat difasilitasi oleh beberapa OPD, sehingga usaha yang dijalankan menjadi legal. Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB melalui PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) melayani berbagai izin usaha UMKM, Dinas Perindustrian, Badan Riset Inovasi Daerah, juga memberi pelayanan perizinan. Balai Kemasan Produk-produk Unggulan Daerah secara khusus melayani pengemasan produk UKM seluruh NTB, Balai Diklat Koperasi UKM Prov. NTB memfasilitasi pelatihan usaha Koperasi dan UKM seluruh NTB guna

meningkatkan kapasitas SDM UMKM terutama dalam menjalankan usahanya.

h) Bantuan.

Bantuan peralatan sebagai stimulus ekonomi dilakukan agar pelaku UMKM semakin berdaya dalam merebut pangsa pasar dalam maupun luar daerah, yang semakin terbuka. Bantuan peralatan dengan tujuan utama (a) memudahkan pelaku UMKM, dan (b) meningkatkan produksi. Untuk memperkuat perekonomian masyarakat maka peralatan yang diberikan merupakan buatan IKM lokal dalam bentuk mesin pengolah jagung, padi, kopi, coklat, mete, kelapa, mesin pengolah abon ikan, pakan ikan, pendingin ikan, mesin pengolah HHBK dan pengolah sampah, mesin pengolah pakan ternak hijau dan unggas, mesin peralatan pengolah komoditas IKM, paket perangkat dagang UMKM dan kaki lima, motor listrik, mobil listrik, *booth portable*, dan lain-lain. Bantuan peralatan yang berasal dari IKM lokal dimaksudkan untuk menggerakkan IKM serta meningkatkan kepercayaan IKM dan perwujudan dari Bela dan Beli Produk Lokal.

i) Organisasi

Untuk memperkuat posisi tawar (*bergaining position*) dan *sharing* pengalaman, UMKM juga sudah membentuk berbagai organisasi dan komunitas antara lain IWAPI, IPEMI, Perwira, Gemawira, PPJI, dan lain-lain. Adanya berbagai organisasi UMKM tersebut akan mempermudah dalam pembinaan dan UMKM juga mempunyai posisi tawar yang lebih kuat.

Strategi penguatan UMKM tersebut, pada prinsipnya menciptakan pasar dan mendorong rasa cinta bagi produk-produk UMKM NTB. Dengan pasar yang semakin terbuka luas, maka UMKM akan terdorong untuk meningkatkan produksi serta menumbuhkan UMKM baru atau yang dikenal dengan *market driven strategy*. UMKM akan memproduksi barang dan jasa yang dikehendaki pasar, sehingga setiap produk yang dikeluarkan akan diterima pasar. Strategi ini juga perlu dipertimbangkan kontinuitasnya, karena lama-kelamaan strategi ini akan dikendalikan oleh pasar terutama menyangkut harga. Akibatnya akan terjadi persaingan harga diantara UMKM, sehingga akan menurunkan keuntungan dan minat UMKM untuk memproduksi barang dan jasa yang sama.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, diarahkan melalui pemberdayaan UMKM/ IKM melalui pengolahan bahan baku lokal terutama menyangkut hasil-hasil dari sektor pertanian, sehingga akan meningkatkan nilai tambah. Industri skala besar yang sangat terbatas, akan menjadi peluang bagi UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang. Strategi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memfasilitasi pertumbuhan UMKM banyak dilakukan melalui pembuatan regulasi, fasilitasi pasar, dan fasilitasi perizinan, dan stimulus ekonomi yang dapat menjadi peluang usaha dan membentuk ekosistem usaha yang memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang.

Saran

Untuk meningkatkan tumbuh kembang UMKM, maka pelaku UMKM perlu ditingkatkan kapasitasnya, melalui pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kebutuhan dasar bagi usaha dalam bentuk bantuan alat dan sarana yang diperlukan. Fasilitasi pasar akan semakin mendorong tumbuh kembang UMKM dengan meningkatkan produksi dan terbentuknya UMKM baru dan mengurangi pengangguran. Agar pasar tidak jenuh terhadap produk UMKM, maka diperlukan inovasi baru dan *up grade* produk, baik menyangkut rasa, tampilan produk, proses yang makin efisien, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2020. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram.
- BPS Provinsi NTB. 2022. *PDRB : Produk Domestik Regional Bruto*. Mataram.
- Dinas Perdagangan Prov. NTB. 2020. *Direktori IKM/UMKM di Nusa Tenggara Barat. Peluang, Pengembangan dan Tantangannya*. Mataram.
- Jhingan, ML. 2018. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2020. *Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Bela dan Beli Produk Lokal*. Mataram.